PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

K E B U M E N

NOMOR : 1 TAHUN 1989

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1989/1990.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1989/1990 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa-Tengah, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusun

an Perhitungan.....

an Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 Ttentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah ;

18. Keputusan .....

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/224 PUOD tanggal 16 Januari 1989 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 ;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 26/SK/DPRD Tahun 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kebumen, Jis Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 17/SK/DPRD/ 1982 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 04/KEP/DPRD/1987.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 10, 11, 13, dan 14 Maret 1989 ;

2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 31 Maret 1989.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA.....

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1989/1990.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 adalah sebesar Rp. 10.561.515.000,00 terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 10.561.515.000,00

b. BELANJA :

- R u t i n Rp. 6.181.267.000,00
- Pembangunan Rp. 4.380.248.000,00 Rp. 10.561.515.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut:

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 1.560.236.000,00

b. BELANJA :

- R u t i n Rp. 1.560.236.000,00
- Pembangunan Rp. - Rp. 1.560.236.000,00

Pasal 3

(1). Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.

(2). Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan Pasal 2 dimuat dalam Lampiran A.I, A.II/R dan A.II/P.

(3). Contoh rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan penggeseran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan .....

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1989.

Ditetapkan di : KEBUMEN
Pada Tanggal : 31 MARET 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
K E T U A

CAP. ttd.

SARIDJAN HADISOEMARTO.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

CAP. ttd.

H. M.C. T O H I R.
NIK. D - 4636/D.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa - Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 5 Juni 1989 Nomor : 903/934/1989.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 4 Tahun 1989 Seri D pada tanggal 10 Juni 1989.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

CAP. ttd.

Drs. SOELARNO.
NIP. 500031924.

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

TAHUN ANGGARAN

| PENDAPATAN | JUMLAH ANGGARAN TAHUN 1988/1989 (Rp) | JUMLAH ANGGARAN TAHUN 1989/1990 (Rp) | BERTAMBAH ( BERKURANG ) (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 3. |
| PENDAPATAN DAERAH : | | | |
| 1. Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu | 112.400.000 | - | (112.400.000,- |
| 2. Pendapatan Asli Daerah. | 1.729.599.000,- | 2.033.314.000,- | 303.715.000,- |
| 2.1. Pajak Daerah | 296.700.000,- | 332.826.000,- | 36.126.000,- |
| 2.2. Retribusi Daerah. | 1.032.572.000,- | 1.235.463.000,- | 202.891.000,- |
| 2.3. Bagian laba dari Badan Usaha Milik Daerah | 55.152.000,- | 59.000.000,- | 3.848.000,- |
| 2.4. Penerimaan dari Dinas-Dinas | 338.175.000,- | 403.025.000,- | 64.850.000,- |
| 2.5. Penerimaan lain-lain. | 7.000.000,- | 3.000.000,- | ( 4.000.000,- |
| 3. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak | 771.074.000,- | 831.380.000 | 60.306.000,- |
| 3.1. Bagi Hasil Pajak | 752.500.000,- | 814.380.000 | 61.880.000,- |
| 3.2. Bagi hasil Bukan Pajak | 18.574.000,- | 17.000.000 | ( 1.574.000,- |
| 4. Sumbangan dan Bantuan : | 6.690.767.000,- | 7.696.821.000 | 1.006.054.000. |
| 4.1. Sumbangan | 3.774.175.000,- | 4.316.573.000 | 542.398.000,- |
| 4.2. Bantuan | 2.916.592.000,- | | 463.656.000,- |
| JUMLAH PENDAPATAN | 9.303.840.000.- | 10.561.515.000 | 1.257.675.000,- |

DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

L1989 / 1990

| B E L A N J A | JUMLAH ANGGARAN TAHUN 89/ 89 (Rp) | JUMLAH ANGGARAN TAHUN 89/ 90 (Rp) | BERTAMBAH (BERKURANG) (Rp) |
|---|---|---|---|
| 5. | 6. | 7. | 8. |
| BELANJA R U T I N : | | | |
| 1a. Belanja DPRD. | 213.687.000.- | 217.258.000.- | 3.571.000. |
| 1b. Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. | 64.500.000.- | 66.000.000.- | 1.500.000. |
| 1. Belanja Pegawai | 2.951.449.000.- | 3.418.751.000.- | 467.302.000. |
| 2. Belanja Barang | 606.762.000 | 619.170.000 | 12.408.000. |
| 3. Belanja Pemeliharaan | 265.070.000. | 315.788.000 | 50.718.000. |
| 4. Belanja Perjalanan Dinas. | 69.330.000. | 69.980.000 | 650.000. |
| 5. Belanja lain-lain | 533.200.000. | | 46.378.000. |
| 6. Angsuran Pinjaman Hutang dan Bunga | - | 579.578.000 | - |
| 7. Belanja Pensiun dan Onderstand | 731.078.000. | 802.392.000 | 71.314.000. |
| 8. Ganjaran/Subsidi/Sumbangan kepada Daerah Bawahan | - | - | - |
| 9. Pengeluaran-pengeluaran yangg tidak termasuk Bagian lain | 34.850.000. | 81.350.000 | 46.500.000. |
| 10. Pengeluaran tidak tersangka | 11.200.000. | 11.000.000 | ( 200.000.) |
| JUMLAH BELANJA RUTIN: | 5.481.126.000 | 6.181.267.000 | 700.141.000. |
| BELANJA PEMBANGUNAN : | | | |
| 1. Belanja Murni = 18 Sektor | 3.663.027.000 | 4.331.498.000 | 568.471.000 |
| 2. Subsidi Bantuan Pembangunan kepada Daerah Bawahan | 30.000.000 | 30.000.000 | |
| 3. Pembayaran kembali Pinjaman | 29.687.000 | 18.750.000 | (10.937.000) |
| JUMLAH BELANJA PEMBANGUNAN | 3.822.714.000 | 11.380.248.000 | 557.534.000 |
| JUMLAH BELANJA : | 9.303.840.000 | 10.561.515.000 | 1.257.675.000 |

DAFTAR PERGESERAN PASAL - PASAL YANG DIPERKENANKAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

LAMPIRAN : II
CONTOH : A.

| Nomor | Jenis Belanja | Pasal-Pasal | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1. | BELANJA D P R D | 2.2.1.1004.a. | |
| | | 1005.a. | |
| | | 1006.a. | |
| 2. | BELANJA SEKRETARIAT DPRD. | 2.2.1.1011 s/d 1016 | Belanja Barang |
| | | 1051 s/d 1054 | Belanja Pemeliharaan. |
| | | 1071 s/d 1074 | Belanja Perjalanan Dinas. |
| | | 1081 s/d 1100 | Belanja Lain-lain. |
| 3. | KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH. | 2.2.2.1001.b. | |
| | | 1009.b. | |
| | | 1010.b. | |
| 4. | SEKRETARIAT. | 2.2.3.1011 s/d 1050 | Belanja Barang |
| | | 1051 s/d 1055 | Belanja Pemeliharaan. |
| | | 1071 s/d 1074 | Belanja Perjalanan Dinas. |
| | | 1081 s/d 1100 | Belanja Lain-lain |
| 5. | DIPENDA. | 2.2.4.1011 s/d 1018 | Belanja Barang |
| | | 1051 s/d 1054 | Belanja Pemeliharaan. |
| | | 1071 s/d 1074 | Belanja Perjalanan Dinas. |
| | | 1081 s/d 1100 | Belanja lain-lain |
| 6. | INSPEKTORAT WILAYAH KABUPATEN. | 2.2.5.1011 s/d 1016 | Belanja Barang. |
| | | 1051 s/d 1054 | Belanja Pemeliharaan. |
| | | 1071 s/d 1080 | Belanja Perjalanan Dinas. |
| | | 1081 s/d 1100 | Belanja Lain-lain |
| 7. | BAPPEDA. | 2.2.6.1011 s/d 1016 | Belanja Barang |
| | | 1051 s/d 1054 | Belanja Pemeliharaan. |
| | | 1071 s/d 1074 | Belanja Perjalanan Dinas. |
| | | 1081 s/d 1100 | Belanja Lain-lain |

8. Pembantu Bupati.....

| omor | Jenis Belanja | Pasal-Pasal | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 8. | PEMBANTU BUPATI | 2.2.7.1011 s/d 1016 | Belanja Barang. |
| | | 1051 s/d 1054 | Belanja Pemeliharaan. |
| | | 1071 s/d 1074 | Belanja Perjalanan Dinas. |
| | | 1081 s/d 1100 | Belanja Lain-lain |
| 9. | KECAMATAN-KECAMATAN | 2.2.8.1011 s/d 1016 | Belanja Barang |
| | | 1051 s/d 1054 | Belanja Pemeliharaan. |
| | | 1071 s/d 1074 | Belanja Perjalanan Dinas. |
| | | 1081 s/d 1100 | Belanja Lain-lain |
| 10. | DINAS PARIWISATA. | 2.2.9.1011 s/d 1016 | Belanja Barang |
| | | 1051 s/d 1054 | Belanja Pemeliharaan. |
| | | 1071 s/d 1074 | Belanja Perjalanan Dinas. |
| | | 1081 s/d 1100 | Belanja Lain-lain |
| 11. | B P - 7. | 2.2.10.1011 s/d 1016 | Belanja Barang |
| | | 1051 s/d 1054 | Belanja Pemeliharaan. |
| | | 1071 s/d 1075 | Belanja Perjalanan Dinas. |
| | | 1081 s/d 1100 | Belanja Lain-lain |
| 12. | RPD INDRAKILA. | 2.2.11.1011 s/d 1016 | Belanja Barang |
| | | 1051 s/d 1054 | Belanja Pemeliharaan. |
| | | 1071 s/d 1074 | Belanja Perjalanan Dinas. |
| | | 1081 s/d 1100 | Belanja Lain-lain |
| 13. | DINAS PEKERJAAN UMUM | 2.3.1. 1011 s/d 1016 | Belanja Barang |
| | | 1051 s/d 1059 | Belanja Pemeliharaan. |
| | | 1071 s/d 1074 | Belanja Perjalanan Dinas. |
| | | 1081 s/d 1100 | Belanja Lain-lain |
| 14. | DINAS KESEHATAN RAKYAT. | 2.5.1. 1011 s/d 1016 | Belanja Barang |
| | | 1051 s/d 1054 | Belanja Pemeliharaan. |
| | | 1071 s/d 1074 | Belanja Perjalanan Dinas. |
| | | 1081 s/d 1100 | Belanja Lain-lain |

15.RUMAH SAKIT.....

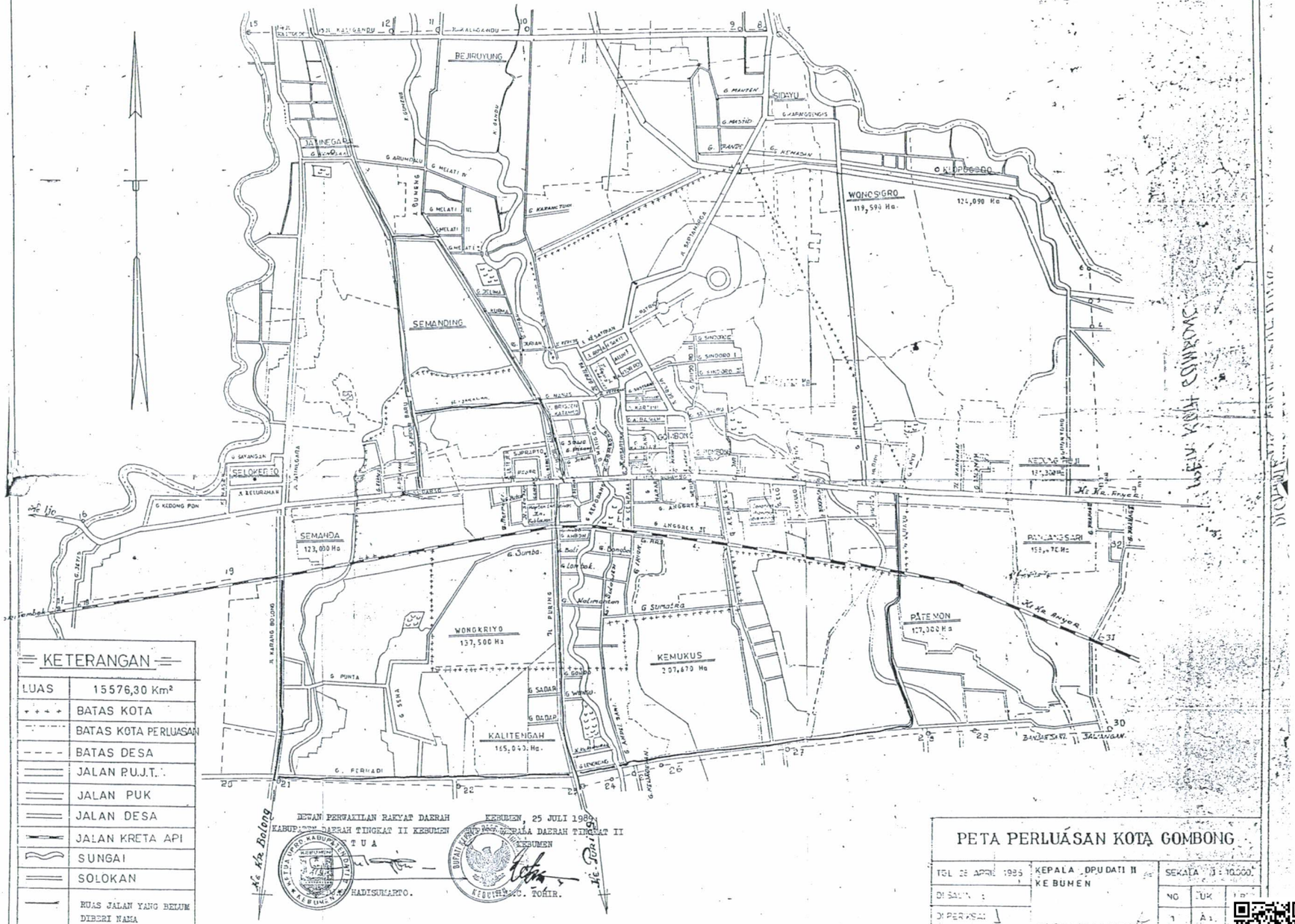
| Nomor | Jenis Belanja | Pasal-Pasal | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 15. | RUMAH SAKIT UMUM KE-BUMEN. | 2.5.2. 1011 s/d 1026 | Belanja Barang |
| | | 1051 s/d 1057 | Belanja Pemeliharaan. |
| | | 1071 s/d 1074 | Belanja Perjalanan Dinas. |
| | | 1081 s/d 1100 | Belanja Lain-lain |
| 16. | PUSKESMAS I WERO GOMBONG DAN PUSKESMAS PERCONTOHAN PREMBUN | 2.5.3. 1011 s/d 1025 | Belanja Barang |
| | | 1051 s/d 1054 | Belanja Pemeliharaan. |
| | | 1071 s/d 1074 | Belanja Perjalanan Dinas. |
| | | 1081 s/d 1100 | Belanja Lain-lain |
| 17. | DINAS PETERNAKAN. | 2.8.4.1011 s/d 1016 | Belanja Barang |
| | | 1051 s/d 1054 | Belanja Pemeliharaan. |
| | | 1071 s/d 1074 | Belanja Perjalanan Dinas. |
| | | 1081 s/d 1100 | Belanja Lain-lain |
| 18. | DINAS PERIKANAN. | 2.8.5.1011 s/d 1016 | Belanja Barang |
| | | 1051 s/d 1054 | Belanja Pemeliharaan. |
| | | 1071 s/d 1074 | Belanja Perjalanan Dinas. |
| | | 1081 s/d 1100 | Belanja Lain-lain |

19. Pasal-Pasal ini dan Pasal 2.14.1. 1131 s/d 1136 dapat ditambah pula dengan mengurangi Pengeluaran Tidak Tersangka ( Pasal 2.15.1.1151.)

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR : 2 TAHUN 1989.

# PETA PERLUASAN - KOTA GOMBONG

SEKALA 1 : 10.000.




## KETERANGAN

| | |
|---|---|
| LUAS | 15576,30 Km² |
| | BATAS KOTA |
| | BATAS KOTA PERLUASAN |
| | BATAS DESA |
| | JALAN P.U.J.T. |
| | JALAN PUK |
| | JALAN DESA |
| | JALAN KRETA API |
| | SUNGAI |
| | SOLOKAN |
| | RUAS JALAN YANG BELUM DIBERI NAMA |

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
KETUA

HADISUMARTO.

KEBUMEN, 25 JULI 1989
KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

H. SOEBROTO TOHIR.

## PETA PERLUASAN KOTA GOMBONG

| | | |
|---|---|---|
| TGL 28 APRIL 1989 | KEPALA DPU DATI II KEBUMEN | SEKALA 1 : 10.000 |
| DISAHKAN : | | NO. LUK. |
| DIPERIKSA : | | 1 A1. |
| | IR. HARIJADI | |
| | NIP. 010.177.083 | |